

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan gender telah menjadi isu global yang berusaha untuk di atasi oleh berbagai negara. 159 negara anggota PBB merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada 2015, mencakup 17 tujuan salah satunya kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada suatu keadaan yang setara antara laki-laki maupun perempuan dalam hal pemenuhan hak sebagai manusia dan kesempatan untuk ikut berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pembangunan, serta pertahanan dan keamanan.¹

Ketimpangan terhadap kaum perempuan dalam sistem budaya patriarki masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender. Budaya patriarki yang telah mengakar selama berabad-abad membentuk pola pikir masyarakat, di mana laki-laki sering kali ditempatkan dalam posisi dominan, sementara perempuan dianggap memiliki peran terbatas dalam ranah domestik dan sosial. Nilai-nilai ini terus diwariskan melalui keluarga, pendidikan, dan institusi sosial lainnya, sehingga perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.²

Ketimpangan ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor ekonomi dan politik. Perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang berujung pada kesenjangan pendapatan dan

¹Larashati, "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam SDGS (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55–61.

² Paula Alfa Lopies and Arly E.M. de Haan, "Penerapan Konseling Lintas Budaya Dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki," *Ciencieas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 41.

keterbatasan dalam menempati posisi kepemimpinan. Di ranah politik, jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki, sehingga suara dan aspirasi mereka belum sepenuhnya terwakili dalam kebijakan publik. Selain itu, pembagian kerja yang tidak setara juga membuat perempuan harus menanggung beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah sambil tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak.³

Selain faktor struktural, ketimpangan gender juga diperkuat oleh interpretasi tradisional dan keagamaan yang sering kali membatasi ruang gerak perempuan.⁴ Meskipun banyak ajaran agama yang menekankan kesetaraan, dalam praktiknya masih terdapat pandangan yang memperkuat posisi subordinat perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Media massa juga turut berperan dalam membangun stereotip gender dengan menampilkan perempuan dalam peran-peran tradisional atau sebagai objek, sehingga memperkuat persepsi publik tentang batasan peran yang dapat dijalankan oleh perempuan.⁵

Dampak dari budaya patriarki ini sangat luas yakni marginalisasi, diskriminasi, ketidakadilan struktural, kekerasan, beban kerja ganda (*double burdens*), pembatasan potensi individu, ketidaksetaraan peluang, rendahnya percaya diri, stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan mental dan fisik yang terpengaruh, stereotip gender, kesenjangan upah, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pelayanan dan kesehatan.⁶

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 28.350 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 80,1% korban adalah perempuan (24.596 kasus). Sementara itu, korban laki-laki hanya

³ M. Rizki Aula, “Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

⁴ Harjoni dkk, “Pengaruh Budaya Dan Agama Terhadap Keadilan Gender: Perspektif Kontemporer,” *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7 no. 1 (2022): 152–167.

⁵ Yanti Dwi Astuti, “Media Dan Gender Studi Deskriptif Representasi Stereotipe Perempuan Dalam Iklan Di Televisi Swasta,” *Profilik Jurnal Komunikasi* Vo. 9 no. 2 (2016).

⁶ Aula, “Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia.”, 188

mencapai 19,9% (6.123 kasus). Data ini mengonfirmasi bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki.⁷ Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus kekerasan terhadap perempuan juga menonjol, dengan kasus perdagangan orang (TPPO), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan seksual terhadap anak mendominasi dari tahun ke tahun. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi salah satu wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Pada tahun 2024, tercatat 185 kasus kekerasan di TTS, dengan total 671 kasus di seluruh NTT. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi masalah serius yang perlu ditangani.⁸

Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan di wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama di jenjang perguruan tinggi, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di Kabupaten TTS, hanya 4,70% perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi, sementara laki-laki mencapai 8,29%.⁹ Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena peran mereka terbatas pada urusan domestik. Perempuan cenderung tidak disertakan dalam pendidikan, sehingga mereka selalu dilihat sebagai orang yang tidak mampu, baik secara “otot” maupun “otak”.¹⁰

Menanggapi masalah ini, Majelis Jemaat GMIT Nekamese Imanuel Postenu menginisiasi program *Skol bife* atau sekolah perempuan. *Skol bife* merupakan sekolah informal yang bertujuan memberdayakan perempuan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kepercayaan diri. Program ini dirancang oleh gereja untuk mengubah pola pikir

⁷ Novemy, NTT Gudang Kekerasan Seksual, KDRT dan TPPO, Tribun News, 23 Januari 2025, <https://kupang.tribunnews.com/2025/01/23/ntt-gudang-kekerasan-seksual-kdrt-dan-tppo>, diakses 4 Januari 2025

⁸ Fransiskus Talla, “Kadis P3A Kabupaten TTS: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurun di Tahun 2024”, diakses 4 Februari 2025, https://soe.faktahukumntt.com/nasional/kadis-p3a-kabupaten-tts-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurun-di-tahun-2024/#google_vignette

⁹ TTS Dalam Angka, 2019

¹⁰ Paula Alfa Lopies dan Arly E.M. de Haan, “Penerapan Konseling Lintas Budaya Dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki,” *Ciencieas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 41.

masyarakat yang patriarkis, dengan menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Melalui *Skol bife*, perempuan diajarkan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami, menolak penyelesaian kasus secara kekeluargaan, serta memahami hak-hak mereka. Selain itu, program ini juga mendorong perubahan peran dalam rumah tangga, di mana laki-laki turut mengusahakan hak-hak dari perempuan.¹¹

Dalam menjalin hubungan dengan berbagai komunitas kemanusiaan, pada akhirnya sekolah perempuan atau *Skol bife* di jemaat GMIT Nekamese Imanuel Postenu secara efektif dimulai pada tahun 2020 dengan kegiatan belajar dilakukan satu kali seminggu selepas kebaktian. Bahan ajar utama terdiri dari tujuh modul yakni: seks dan gender, Perempuan dan budaya, Perempuan dan politik, Perempuan dan Kesehatan lingkungan, Perempuan dan Kesehatan reproduksi, Perempuan dimata hukum, Perempuan dan ekonomi solidaritas, Parenting. Secara teknis setiap modul diajarkan selama delapan kali pertemuan (2 bulan).¹² Menarik bahwa dalam berjalannya program *Skol bife*, tidak saja diperuntukkan bagi para perempuan tetapi juga bagi para laki-laki dengan durasi waktu belajar satu kali dalam satu bulan dengan menggunakan bahan ajar/modul yang sama.

Keberadaan *Skol bife* telah membawa perubahan dalam masyarakat, terutama di kalangan suku Timor yang dikenal sangat kuat dengan budaya patriarkinya. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran *Skol bife* sebagai bentuk resistensi diri perempuan dalam keberlangsungan hidup bersama di jemaat GMIT Imanuel Postenu.¹³

¹¹ Seprinus Adonis, wawancara dengan penulis, Neke, 13 Februari 2025

¹² Yumince Benu, Wawancara dengan penulis, Neke, 3 Maret 2025

¹³ Seprianus Adonis, wawancara dengan penulis, Neke, 13 Februari 2025.

Menurut penulis, program *Skol bife* yang dikembangkan oleh Majelis Jemaat GMIT Imanuel Postenu merupakan contoh nyata upaya lokal dalam merespon persoalan global. Penelitian ini memungkinkan untuk menggali bagaimana solusi-solusi berbasis komunitas dapat mengatasi tantangan yang timbul akibat budaya patriarki, serta memberikan inspirasi bagi penelitian dan program serupa di daerah lain.

Melalui studi ini, tidak hanya mengkaji fenomena ketidaksetaraan gender, tetapi juga turut serta dalam upaya mengangkat suara perempuan yang selama ini terpinggirkan. Hal ini sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di ranah domestik maupun sosial. *Skol bife* dapat menjadi salah satu gerakan partisipatif perempuan di dalam gereja untuk mengatasi permasalahan global. Hal baik ini dapat menjadi contoh bagi gereja-gereja terkhususnya GMIT untuk mengembangkan pelayanan berbasis gender dan keadilan bagi perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis memandang penting untuk meneliti mengenai *Skol bife*/sekolah perempuan di Jemaat GMIT Nekamese Imanuel Postenu, Klasis Amanuban Tengah Utara ditinjau dari teologi feminis. Maka tesis ini disusun dengan judul ***Skol bife* dan sub judul **Suatu Kajian Teologi Feminis mengenai Sekolah Perempuan di Jemaat GMIT Imanuel Postenu, Klasis Amanuban Tengah Utara.****

1.2 Batasan masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada realitas sekolah perempuan yang diterapkan di Jemaat GMIT Imanuel Postenu, Klasis Amanuban Tengah Utara. Penulis menggunakan konsep pemikiran teologi feminis dari Letty Russel tentang “*Hot House Ecclesiology*”. Kemudian, refleksi teologi feminis dan sumbangsih *skol bife* bagi pelayanan GMIT yang lebih adil gender.

1.3 Rumusan masalah

Melalui latar belakang yang penulis gambarkan, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas program *Skol bife*/sekolah perempuan yang diterapkan di Jemaat Imanuel Postenu, Klasis Amanuban Tengah Utara?
2. Bagaimana kajian teologi feminis dalam kaitannya dengan program *Skol bife*/ sekolah perempuan di Jemaat GMIT Imanuel Postenu?
3. Bagaimana refleksi teologi feminis mengenai *Skol bife* dan sumbangsinya dalam mengembangkan pelayanan GMIT agar lebih adil gender sesuai dengan semangat pembebasan dalam teologi feminis?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan realitas sekolah perempuan di Jemaat Imanuel Postenu, Klasis Amanuban Tengah Utara.
2. Menganalisis konsep teologi feminis dalam kaitannya dengan program *Skol bife*/ sekolah perempuan di Jemaat GMIT Imanuel Postenu?
3. Mengembangkan refleksi teologi feminis dan sumbangsih *Skol bife* dalam mengembangkan pelayanan di GMIT yang adil gender sesuai dengan semangat pembebasan dalam teologi feminis.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan Akademis: sebagai sumber informasi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi teologi dan sebagai informasi yang memperkaya teologi

Kegunaan Praktis: sebagai sumbangan pengetahuan kepada peneliti dan gereja-gereja menjawab kebutuhan pemberdayaan perempuan melalui sekolah informal di dalam gereja.

1.6 Ringkasan penelitian terdahulu

Penelitian mengenai *Skol bife* telah dilakukan oleh seorang peneliti yakni Fransius Fernando Mau dengan skripsi berjudul *Pendidikan Perempuan dalam Bingkai Pemberdayaan*. Skripsi ini disusun pada tahun 2024 dengan menggunakan kajian Misiologi. Dalam tulisannya Fransius membahas *Skol bife* sebagai pendidikan pemberdayaan perempuan dalam kajian misiologi, dengan fokus pada bagaimana program ini berkontribusi dalam mengangkat posisi perempuan di Jemaat GMIT Nekameise Imanuel Postenu. Penulis menyoroti bagaimana misi gereja yang holistik tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan spiritual jemaat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang sering kali menjadi tantangan dalam kehidupan perempuan.¹⁴

Menurut Fransius, gereja memiliki tanggung jawab misioner untuk melakukan diakonia transformatif, yaitu pelayanan yang bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang. *Skol bife* menjadi alat bagi gereja untuk membebaskan perempuan dari belenggu keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan ketidakadilan sosial.

Topik mengenai sekolah perempuan telah ditulis oleh Dini Anjani Nurlatifah dan kawan-kawan. Mereka menyoroti proses pemberdayaan perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di lingkungan Kampung Munjur Kelurahan Karikil, Jawa Barat. Sekolah perempuan merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh program Sekoper Cinta terhadap perempuan di Kampung Munjur. Pemberdayaan perempuan oleh program Sekoper Cinta memberikan pengalaman dan pengajaran untuk lebih

¹⁴Fransius Fernando Mau, “Pendidikan Perempuan Dalam Bingkai Pemberdayaan” (Skripsi, Program Studi Teologi Universitas Kristen Artha Wacana, 2025), 6

membuka pikiran dan memperhalus perasaan, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia bagi perempuan dengan cara yang berbeda. Sehingga dengan berdayanya kaum perempuan, kaum ibu, akan memberikan sumbangsih kesejahteraan sosial dan meminimalisir masalah sosial karena pada tiap rumah memiliki jantung yang sehat dan berkualitas yaitu seorang ibu.¹⁵

Peneliti lain yang mengkaji mengenai sekolah perempuan ialah Mami Suciati. Penelitian yang dilakukan oleh Mami Suciati berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui sekolah perempuan, dengan tujuan untuk memahami proses, hasil, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun sekolah perempuan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan sikap peserta terhadap pemberdayaan ekonomi, masih dibutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan perbaikan dalam aspek pendanaan, aksesibilitas, dan pendampingan yang lebih komprehensif, program ini berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi perempuan dan komunitas mereka.¹⁶

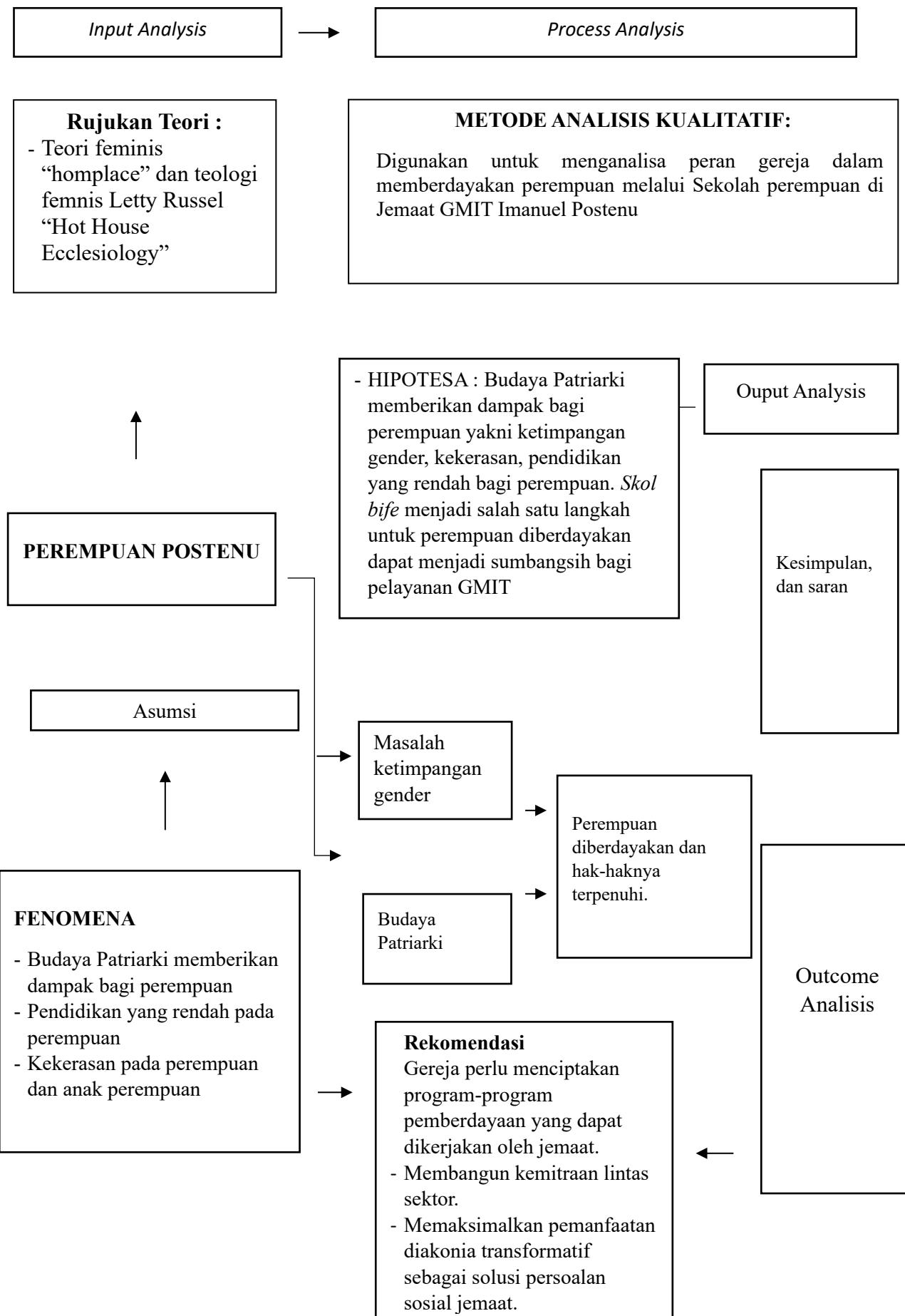
Berbeda halnya dengan Fransius, yang melihat *Skol bife* sebagai gerakan misioner gereja, Dini, dan Mami yang mengkaji sekolah perempuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta kendalanya, penulis melihat *Skol bife* dari sudut pandang teologi feminis. Penulis melihat konteks budaya patriarki yang masih menguat dan *Skol bife* hadir sebagai bentuk pendidikan alternatif yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap kesetaraan gender, keadilan, dan hak-hak perempuan dalam masyarakat.

¹⁵ Dini Anjani Nurlatifah, Deden Sumpena, and Fathin Anjani Hilman, “Proses Pemberdayaan Perempuan Pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita (Sekoper Cinta),” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 35–45.

¹⁶ Mami Suciati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 7.

Penelitian sebelumnya belum memberikan perhatian tentang sekolah perempuan sebagai bentuk resistensi terhadap budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis menyoroti peran *skol bife* sebagai bentuk resistensi berbasis kearifan lokal terhadap kekerasan, budaya patriarki, yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi kelas dua. Dalam konteks ini, *Skol bife* bisa dipahami sebagai upaya perempuan untuk membentuk dan menguatkan identitas serta agensi diri mereka sebagai subjek yang berdaulat atas tubuh dan kehidupan mereka. Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pelayanan GMIT yang masih berjuang dengan budaya patriarki, kekerasan pada perempuan, pendidikan bagi perempuan yang masih rendah, dan ketimpangan gender yang masih menguat.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Sistematika penulisan

Bab I (Pendahuluan): Bab ini berisi pemaparan latar belakang, batasan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ringkasan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka): Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang berbicara mengenai feminism dan teologi feminis dalam kaitannya dengan *skol bife* bagi perempuan dan upaya gereja sebagai ruang yang membebaskan.

Bab III (Metodologi Penelitian): Bab ini terdiri atas empat bagian yakni alasan penggunaan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Analisa): Bab ini berisi gambaran tentang tempat dan lokasi penelitian yakni Desa Neke, kecamatan Oenino, kabupaten Timor Tengah Selatan dan Jemaat GMIT Imanuel Postenu. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai latar belakang sejarah *Skol bife* dan proses evaluasi atau penilaian, dan analisis terhadap hasil penelitian.

Bab V (Refleksi Teologis): Bab ini berisi refleksi teologis terhadap pokok yang dibahas.

PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.